



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat DISPERPUSIP adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat Renstra DISPERPUSIP adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat Renja DISPERPUSIP adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun.



**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**Pasal 2**

- (1) Renstra DISPERPUSIP Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DISPERPUSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun Renja DISPERPUSIP.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra DISPERPUSIP disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Renstra DISPERPUSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib melaksanakan Renstra DISPERPSIP dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DISPERPUSIP.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DISPERPUSIP Tahun 2027, Renstra DISPERPUSIP Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DISPERPUSIP Tahun 2027.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 37



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DISPERPUSIP sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Perpustakaan dan Kearsipan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DISPERPUSIP dan Renja DISPERPUSIP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DISPERPUSIP tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DISPERPUSIP meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perpustakaan dan Kearsipan /lintas Renstra Perpustakaan dan Kearsipan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DISPERPUSIP memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

**Pasal 7**

Dokumen Renstra DISPERPUSIP Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DISPERPSIP dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 126**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024-2026 ini.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024-2026 ini merupakan hasil rumusan penyesuaian program dan kegiatan den Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan komitmen seluruh komponen yang ada di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang disusun secara prioritas dan senantiasa dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara perpustakaan dan kearsipan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Pasuruan, April 2023

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN**

ttd.

**Drs. HENIS WIDIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660403 199103 1 018



## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	i
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	11
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	22
III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	23
3.1 Permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	23
3.2 Isu - Isu Strategis .....	26
IV TUJUAN DAN SASARAN .....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	28
4.2 Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	29
V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	39
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	61
VIII PENUTUP .....	65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) daerah dan bersifat indikatif. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah



khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, dimana program tersebut akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Proses penyusunannya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; (4) Penetapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renstra sendiri memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Renstra akan dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKASKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Pembangunan Ekonomi;
10. Peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
14. Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012. Nomor: SE.33/MK.02/2012, Nomor: 505/4379A/SJ, Nomor: SE.46 / MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender (PPRG);
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid-19;



18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018– 2023;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.
22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor       Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

- a. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
- c. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ini antara lain adalah :

- a. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
- b. Untuk pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
- c. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penrenyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.2 Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 4.2 Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

##### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

7.2 Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tenaga professional keahlian dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam rangka meningkatkan komunikasi dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan antara lain :

- a. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan

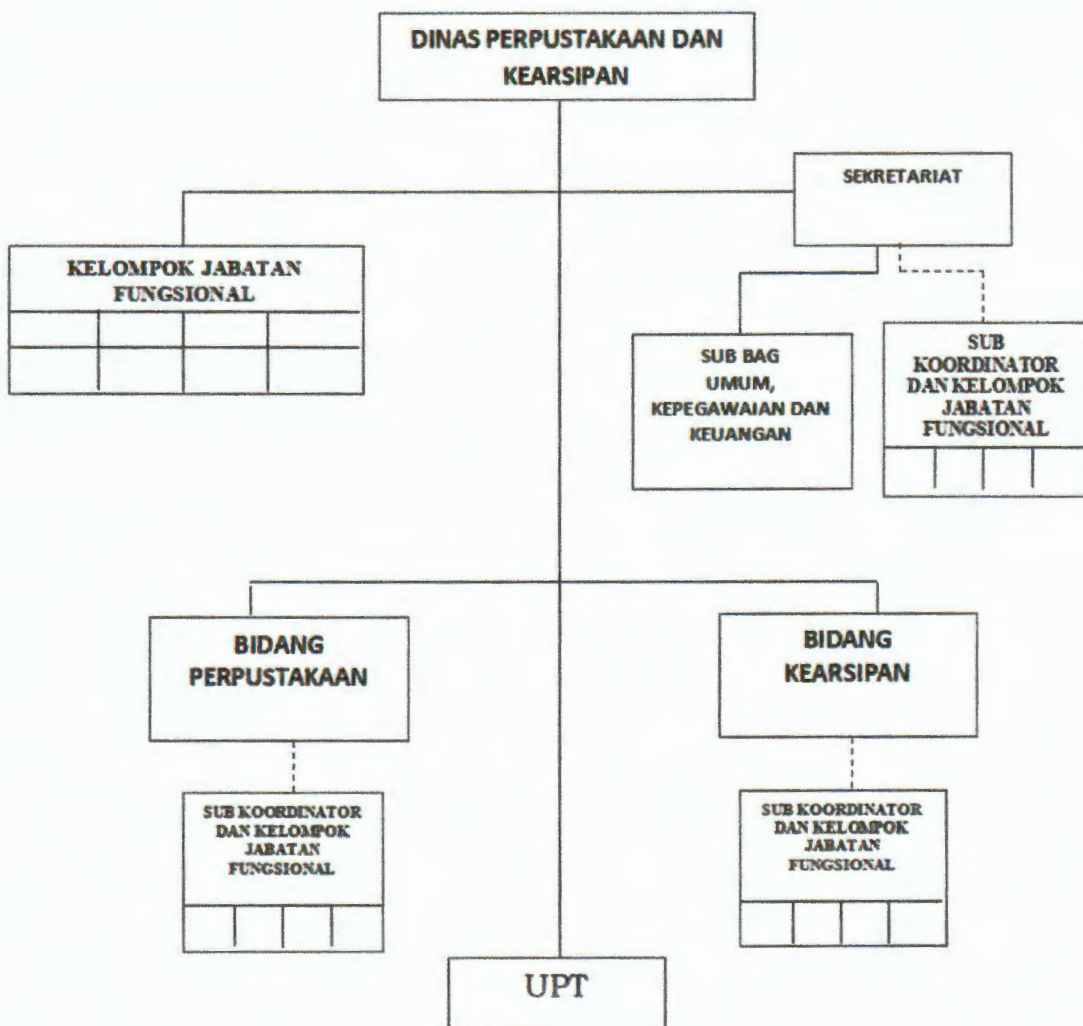


4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan
- b. Sekretaris**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  2. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  3. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  4. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  5. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
  6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; dan
  7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  2. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
  4. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
  5. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan keuangan;
  6. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
  8. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d. Bidang Perpustakaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan program dan kegiatan di bidang perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan dan pengembangan bidang perpustakaan;
  2. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan perpustakaan;
  3. pengembangan program minat, kegemaran dan budaya membaca;
  4. pengkoordinasian pengelolaan perpustakaan;
  5. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan perpustakaan; dan
  6. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.



- e. **Bidang Kearsipan** mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan program dan kegiatan di bidang kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis penyelamatan dan pendayagunaan arsip
  2. pelaksanaan pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan pelestarian arsip;
  3. pelaksanaan pelayanan layanan penggunaan dan pemanfaatan arsip;
  4. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan pendayagunaan arsip;
  5. pelaksanaan penanganan arsip pasca bencana;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelamatan dan pendayagunaan arsip; dan
  7. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terdapat 67 orang pegawai yang terdiri 23 orang PNS, 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 42 orang Tenaga Harian Lepas yang dalam pelaksanaan tugasnya terbagi di beberapa tempat yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan di Perpustakaan Umum yang terdapat di 8 (delapan) wilayah Kecamatan. Kondisi Sumber Daya Manusia dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2023**

No.	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah
		L	P	S2	S1	D3	SLTA	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PNS :								
	Struktural	2	3	4	1	-	-	-	5
	Fungsional	3	5	3	5	-	-	-	8
	Staf	6	5	1	3	-	7	-	11
2.	PTT SK Bupati	2	-	-	1	-	1	-	2
3.	PTT SK Dinas	30	12	1	18	3	20	-	42
	Jumlah	43	25	9	28	3	28	-	67

Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan meliputi bangunan gedung beserta isinya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**DATA ASSET DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2023**

NO	JENIS	NILAI
1	2	3
1.	Tanah	Rp. 45.200.000,00
2.	Bangunan Gedung : - 8 Unit Bangunan Gedung Perpustakaan Umum - 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas - 1 Unit Bangunan Gedung Perpustakaan Daerah	Rp. 16.401.507.287
3.	Peralatan dan Mesin : 4 Unit Mobil Perpustakaan Keliling 5 Unit Mobil Operasional 9 Unit Sepeda motor 2 Unit Roda Tiga Mebeler, Komputer dll	Rp. 6.995.594.820
4.	Barang lainnya (Buku Bacaan, lukisan, dll)	Rp. 3.714.078.950
	Jumlah	Rp. 27.156.381.057

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan Indikator Kinerja 2024-2026 sebagai berikut :**

Capaian kinerja pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut system tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Adapun bentuk layanan perpustakaan meliputi:

- Layanan Informasi
- Layanan Keanggotaan Perpustakaan
- Layanan Sirkulasi baik manual maupun elektronik;
- Layanan Perpustakaan Keliling;
- Layanan Membaca di Tempat;



- Layanan Referensi; Layanan Pembinaan Teknis Perpustakaan bagi perpustakaan umum, desa/kelurahan, sekolah; perpustakaan masyarakat/komunitas;
- Layanan kunjungan (*story telling SD/MI dan Guru SD/MI*);
- Melaksanakan lomba minat baca;
- Melaksanakan bimbingan teknis;
- Melaksanakan pemeliharaan program aplikasi perpustakaan;
- Melaksanakan alih media local content;
- Melaksanakan Sosialisasi peningkatan budaya baca (baca cepat) dan Road Show gemar membaca;
- Melaksanakan Lomba perpustakaan untuk memberikan apresiasi bagi perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah;
- Melaksanakan pelayanan perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;

Selama 5 (lima) tahun terakhir, kinerja urusan perpustakaan di kabupaten Pasuruan terus menunjukkan tren kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koleksi buku di perpustakaan yang meningkat dari 84.108 buku pada tahun 2018 menjadi 90.528 buku manual dan 1.000 judul e-book di tahun 2022. Sedangkan jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 2 (Dua) tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 karena terdampak pandemi Covid-19, capaian kunjungan perpustakaan menurun sebanyak 228.719 orang dari tahun 2019 sebanyak 546.151 orang pengunjung menjadi 317.432 orang pengunjung di tahun 2020 dan menurun lagi ditahun 2021. Penurunan ini karena adanya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan dengan membatasi jumlah kunjungan onsite maupun melaksanakan perpustakaan keliling.

## 2. Bidang Kearsipan.

Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- Layanan Arsip Aktif;
- Layanan Pendataan dan Penataan Arsip Inaktif Daerah;
- Layanan Arsip Statis dengan melaksanakan fasilitasi pengembangan kearsipan daerah penelusuran arsip bersejarah;
- Layanan pembinaan kearsipan kepada tenaga kearsipan di lingkungan instansi pemerintah, pondok pesantren dan swasta dengan memfasilitasi penyusunan rumusan/rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan;
- Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah);

- Layanan bimbingan pengolahan arsip yang baik;
- Layanan Akuisi dan Pengelolaan Kearsiapan berupa penyelamatan arsip daerah melalui akuisisi dan restorasi Letter C;
- Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi dan termit kontrol.



**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PASURUAN**

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2018	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2018	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perpustakaan dan kearsipan				82	82,5	83	83,5	84	84,5	82,56	82,75	83,33	83,58		100,30	100,40	100,10	0,00	0,00
2	Jumlah Pengunjung perpustakaan				329600	351500	373450				329600	351450	317432		99,99	85,00	0,00	0,00	0,00	
3	Porsentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan							30%					30,13%		0,00	0,00	100,43	0,00	0,00	
4	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)							54,99					62,18		0,00	0,00	113,09	0,00	0,00	
5	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan							55,17					52,06		0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	
6	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan							59,33					67,19		0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	
7	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan							50,46					67,3		0,00	0,00	133,37	0,00	0,00	
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)							7	8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan							0,08	0,08						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2018	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2018	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)
10	Persentase Anggota Perpustakaan diseluruh Jenis Perpustakaan								1,22	1,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Persentase Tenaga Perpustakaan yang memiliki Kualifikasi Bidang Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi								0,09	0,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Persentase Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari								0,001	0,001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Peprustakaan								0,001	0,001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi								0,15	0,16						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan								6,50	6,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI				61	70	75	77	80	81	62,03	79,67	79,67	56,36		113,81	106,23	73,19	0,00	0,00
17	Nilai SAKIP PD				68	70	72	75	78	80	69,75	70,27	72,54	72,65	78,76	100,39	100,75	96,87	0,00	0,00



**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6.344.424.992</b>	<b>5.905.257.329</b>	<b>6.022.860.276</b>	<b>6.092.764.792</b>	<b>5.743.683.368</b>	-	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3%</b>	<b>-6%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	50.574.440	55.813.100	75.478.000	49.963.640	53.677.000	-	0,99	0,96	0,00	22%	7%
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	17.496.440	13.983.100	17.777.000	17.061.640	12.496.000		0,98	0,89	0,00	1%	-27%
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	33.078.000	41.830.000	57.701.000	32.902.000	41.181.000		0,99	0,98	0,00	32%	25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.262.396.238	4.324.616.869	4.602.305.777	4.151.016.886	4.304.919.853	-	0,97	1,00	0,00	4%	4%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.312.774.210	3.333.436.345	3.635.451.257	3.216.458.136	3.353.709.357		0,97	1,01	0,00	5%	4%
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	949.622.028	991.180.524	966.854.520	934.558.750	951.210.496		0,98	0,96	0,00	1%	2%
	Administrasi Umum Perangkat Dearah	377.795.483	441.647.440	419.446.280	353.112.980	400.645.738	-	0,93	0,91	0,00	5%	13%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.085.200	17.703.400	11.766.000	6.085.200	17.703.400		1,00	1,00	0,00	39%	191%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.658.665	45.625.110	27.115.320	45.719.415	44.358.920		0,98	0,97	0,00	-24%	-3%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.810.688	92.230.930	84.731.000	56.732.480	89.496.940		1,00	0,97	0,00	22%	58%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.363.630	46.068.000	30.018.960	42.985.230	59.258.940		0,95	1,29	0,00	-19%	38%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.831.300	59.268.000	69.800.000	59.830.975	32.280.275		0,74	0,54	0,00	-7%	-46%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.059.000	29.700.000	15.750.000	3.895.500	6.924.600		0,96	0,23	0,00	97%	78%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.987.000	151.052.000	180.265.000	137.864.180	150.622.663		1,00	1,00	0,00	14%	9%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	674.981.134	257.192.545	218.873.930	645.793.134	233.786.000	-	0,96	0,91	0,00	-43%	-64%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	572.780.134	-	-	546.012.134	-	-	0,95	-	-	0%	0%
	Pengadaan Mebel	52.250.000	-	47.700.000	49.830.000	-	-	0,95	-	-	-4%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.951.000	257.192.545	171.173.930	49.951.000	233.786.000	-	1,00	0,91	0,00	85%	368%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.972.797	316.539.397	322.810.489	231.522.208	245.894.981	-	0,78	0,78	0,00	4%	6%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.972.797	316.539.397	322.810.489	231.522.208	245.894.981		0,78	0,78	0,00	4%	6%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	681.704.900	509.447.978	383.945.800	661.355.944	504.759.796	-	0,97	0,99	0,00	-25%	-24%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.854.740	262.318.238	290.098.400	252.591.744	258.557.693		0,94	0,99	0,00	4%	2%
	Pemeliharaan Mebel		8.800.000	7.900.000		8.650.000			0,98		-10%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.617.760	46.016.740	45.137.400	43.653.000	45.955.000		0,98	1,00	0,00	1%	5%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	367.232.400	192.313.000	40.810.000	365.111.200	191.597.103		0,99	1,00	0,00	-67%	-48%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.169.275.840</b>	<b>1.551.873.620</b>	<b>1.263.696.380</b>	<b>1.156.274.780</b>	<b>1.519.326.722</b>	-	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4%</b>	<b>31%</b>
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	487.609.500	375.535.300	443.888.880	481.269.240	484.535.203		0,99	1,29	0,00	-5%	1%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			7.000.000							0%	0%
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.324.400							0%	0%
	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	50.333.200	10.612.300	299.149.000	50.333.200	122.436.473		1,00	11,54	0,00	144%	143%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			13.424.000							0%	0%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	437.276.300	364.923.000	119.991.480	430.936.040	362.098.730		0,99	0,99	0,00	-48%	-16%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	681.666.340	1.176.338.320	819.807.500	675.005.540	1.034.791.519		0,99	0,88	0,00	10%	53%
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	681.666.340	268.819.360	40.000.000	675.005.540	303.579.500		0,99	1,13	0,00	-76%	-55%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			25.022.000						0,00	0%	0%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		907.518.960	735.858.500		731.212.019			0,81	0,00	-19%	0%
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.927.000						0,00	0%	0%
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>48.399.700</b>	<b>23.680.000</b>		<b>44.353.250</b>			<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-51%</b>	<b>0%</b>
	Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/Kota		23.639.700	11.840.000		19.989.250			0,85	0,00	-50%	0%
	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan		23.639.700	11.840.000		19.989.250			0,85	0,00	-50%	0%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		24.760.000	11.840.000		24.364.000			0,98	0,00	-52%	0%
	Seleksi Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		24.760.000	11.840.000		24.364.000			0,98	0,00	-52%	0%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>223.310.500</b>	<b>899.466.750</b>	<b>178.563.000</b>	<b>222.215.090</b>	<b>651.280.752</b>	-	<b>1,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11%</b>	<b>193%</b>
	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip dinamis daerah Kabupaten/ Kota	66.031.100	125.904.400	56.769.000	65.609.690	120.343.402		0,99	0,96	0,00	-7%	83%
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	66.031.100	99.985.600	51.775.000	65.609.690	97.442.902		0,99	0,97	0,00	-11%	49%
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		25.918.800	4.994.000		22.900.500					-81%	0%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	82.198.000	88.985.550	29.265.000	81.524.000	98.623.050		0,99	1,11	0,00	-40%	21%
	Akuisisi, Pengolahan, Perservasi, dan Akses Arsip Statis	82.198.000	88.985.550	29.265.000	81.524.000	98.623.050		0,99	1,11	0,00	-40%	21%
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	75.081.400	684.576.800	92.529.000	75.081.400	432.314.300	-	1,00	0,63	0,00	11%	476%
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	1.914.000	8.772.500	4.980.000	1.914.000	-	-	1,00	0,00	0,00	61%	0%
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	73.167.400	675.804.300	87.549.000	73.167.400	432.314.300		1,00	0,64	0,00	9%	491%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>		<b>25.715.230</b>	<b>14.995.000</b>		<b>14.285.450</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-42%</b>	<b>0%</b>
	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah</b>			<b>4.920.000</b>							<b>0%</b>	<b>0%</b>
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)			4.920.000							0%	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Reallsasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan</b>			5.083.000							0%	0%
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			5.083.000							0%	0%
	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan</b>		25.715.230	4.992.000		14.285.450		<b>0,00</b>	0,56	0,00	-81%	0%
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		25.715.230	4.992.000		14.285.450		<b>0,00</b>	0,56	0,00	-81%	0%
	<b>Total</b>	<b>7.737.011.332</b>	<b>8.430.712.629</b>	<b>7.503.794.656</b>	<b>7.471.254.662</b>	<b>7.972.929.542</b>	<b>-</b>	<b>0,97</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2%</b>	<b>7%</b>



#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kontes tersebut maka masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses ke perpustakaan dan layanannya, serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa mewajibkan lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.

Dari tinjauan diatas, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan diamanatkan untuk meningkatkan kinerja baik dalam membangun perpustakaan maupun mengelola arsip agar mampu mencapai dan menghasilkan dampak yang efektif dan bermafaat bagi masyarakat sehingga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap sumber informasi serta memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai layanan dan fasilitas di perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dari uraian diatas kelompok sasaran layanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi;
2. Pondok Pesantren;
3. Desa dan Kelurahan;
4. Masyarakat Wilayah Kabupaten Pasuruan.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Salah satu rumusan permasalahan Kabupaten Pasuruan dalam rencana pembangunan daerah 2024 - 2026 adalah belum optimalnya percepatan pembangunan manusia, masih tingginya pengangguran terbuka dan belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memerlukan upaya guna mengurangi dampaknya salah satunya dengan mengembangkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan Nasional RI dalam Rencana Jangka Menengah (PJMN) dan Kementerian PPN/ Bappenas sejak tahun 2018 telah menetapkan kebijakan dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman peradaban dan budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan usaha, melindungi dan memperjuangkan peradaban dan budaya serta hak asasi manusia. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga harus menjangkau kepada masyarakat di pedesaan dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap akses informasi yang berkualitas dan mengurangi ketimpangan dengan penduduk perkotaan serta mengurangi angka urbanisasi.

Saat ini literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang memberikan dampak sosial ekonomi yang membawa kesejahteraan. Dampak literasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain standar dan kualitas hidup, pendapatan per kapita, *gross domestic product*, industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun dalam menjalankan Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memiliki permasalahan, antara lain:

##### 3.1.1 Permasalahan Bidang Perpustakaan

Dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan periode tahun 2024 – 2026 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi. Secara detail permasalahan pada urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan, sampai saat ini Perpustakaan Umum di Kabupaten Pasuruan masih tersedia di 8 (delapan) dari total 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten



Pasuruan saja yaitu Bangil, Rembang, Pandaan, Purwosari, Nguling, Gondangwetan, Grati dan Tosari.

- b. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibuku yang dibutuhkan oleh pemustaka;
- c. Belum adanya bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Belum adanya penggalan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno;
- e. Belum adanya penyusunan Bibliografi daerah;
- f. Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pengelola perpustakaan desa/Kelurahan, sekolah dan komunitas masyarakat/TBM;
- g. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

### 3.1.2 Permasalahan Bidang Kearsipan

Dalam pelaksanaan urusan Kearsipan periode tahun 2024 – 2026 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi. Secara detail permasalahan pada urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Belum memiliki data dan berkas arsip statis yang bernilai guna, sehingga perlu mengadakan sosialisasi terhadap perangkat daerah/organisasi yang memiliki arsip statis, menggali dan menghimpun arsip-arsip bersejarah mengenai Kabupaten Pasuruan;
- b. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
- c. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan;
- d. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah dan Kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan sehingga perlu adanya bimbingan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi Kearsipan.
- e. Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Rak arsip lemari arsip, scanner peta, Depo yang kurang memadai dan representatif jika dibandingkan dengan arsip yang selalu bertambah dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan);
- f. Belum adanya Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman Perangkat daerah melakukan penyusutan arsip.
- g. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (arsiparis dan pengelola kearsipan) dimasing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.1

## Identifikasi Permasalahan

## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi PD
			INTERNAL (Kewenangan Organisasi PD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan Organisasi PD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan publik/ pelayanan prima Perpustakaan	Fasilitas, sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan perpustakaan belum memadai	Standar dan syarat ruang layanan dari Perpustakaan Nasional RI	Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	Kebijakan anggaran yang diberikan terhadap Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya SDM di Bidang Perpustakaan;</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana;</li> <li>3. Terbatasnya anggaran tersedia.</li> </ol>
Pelayanan publik/ pelayanan prima Kearsipan	Pelayanan Belum optimal, belum adanya gedung kearsipan yang memenuhi standar minimal dan terbatasnya jumlah SDM kearsipan	Standar dan syarat ruang layanan Arsip Nasional berupa Keputusan Kepala ANRI No. 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip in Aktif dan Peraturan ANRI Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depo Arsip	Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	Perhatian dana rah kebijakan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan kearsipan, termasuk dalam hal diberikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung pelayanan yang belum tersedia;</li> <li>2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM;</li> <li>3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.</li> </ol>



Peningkatan budaya literasi	Rendahnya jumlah koleksi perpustakaan	Jumlah koleksi buku baik manual maupun elektronik	Koleksi buku, SDM, sarana dan prasarana	Kebijakan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan yang kurang representative;</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana;</li> <li>3. Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> </ol>
Peningkatan sadar arsip	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti penting arsip dalam penyelenggaraan pemerintah maupun semua aspek kehidupan masyarakat	Jumlah kunjungan dan informasi kearsipan	Prasarana dan sarana arsip statis	Kebijakan umum dan kebijakan anggaran	Gedung depo belum ada, anggaran terbatas, SDM kurang
Manajemen tata kelola kearsipan	Belum terlaksana tata kelola kearsipan di organisasi PD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tata kelola kearsipan sesuai dengan UU 43 Tahun 2009 dan turunannya	Kesiapan SDM, anggaran dan sarana prasarana	Kebijakan daerah serta komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah	Ketersediaan sarana prasarana, kualitas dan kuantitas SDM

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangkang menengah.

Mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka dalam kerangka meningkatnya kegemaran membaca masyarakat serta meningkatnya pengawasan arsip perangkat daerah, maka ada beberapa isu strategis, yaitu:

1. Pengolahan data perpustakaan berbasis digital;
2. Terwujudnya layanan prima perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya gemar membaca;
3. Terwujudnya pengelolaan arsip statis untuk menjamin ketersediaan informasi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan**

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dengan mengacu kepada pernyataan tujuan Kabupaten Pasuruan. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kegemaran Membaca Masyarakat		Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	85,00	85,50	86,00
		Meningkatnya Literasi Masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	8,60%	8,70%	8,80%
			Prosentase Pertumbuhan Transformasi Peprustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	5,00%	5,50%	5,70%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip		Nilai Audit Kearsipan	68	68,5	69
		Meningkatnya hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah secara baku	14,70%	22,05%	29,41%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	81	82

#### **4.2 Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan**

Cascading kinerja merupakan proses pejabaran, penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang tinggi ke level unit/pegawai yang rendah. Cascading menggambarkan secara jelas keterkaitan tugas dan fungsi unit (bidang perpustakaan dan kearsipan) secara logis, keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*).

Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024  
- 2026 sebagai berikut:



**Tabel 4.2**  
**Cascading Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Tahun 2024 -2026**

RPD					RENSTRA PD										
No	Urusan	Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1	Urusan Perpustakaan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	1 Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	1 Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan BerNSP	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	
													Tercukupinya Koleksi Perpustakaan	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	
													Meningkatnya Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart	
													Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	

									2	Prosentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)		Meningkatnya Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kegiatan pengembangan minat baca Masyarakat	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca
															Meningkatnya Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial
									2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Koleksi Daerah yang di temukan dan dilestarikan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	
														Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang di temukan dan dilestarikan	Persentase Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan
2	Urusan Kearsipan	Meningkat nya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis	Meningkat nya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkat nya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Meningkatnya hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah secara baku	1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkat nya pengelolaan, perawatan dan pelestarian arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat	









									Penggunaan Arsip	Penggunaan Arsip	Penggunaan Perizinan Arsip	Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penggunaan Perizinan Arsip	
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada rencana. Anggaran, dan evaluasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang akurat	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Pengadaan barang milik daerah	





## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah–langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Strategi tersebut dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hasil rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1. berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan**

TUJUAN RPD: 1. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat				
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi				
SASARAN RPD : 1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia				
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kegemaran Membaca Masyarakat	1 Meningkatnya Literasi Masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan melalui :	1 Pengembangan Peprustakaan melalui akreditasi dan standarisasi perpustakaan
			1 Peningkatan Kualitas layanan perpustakaan	2 peningkatan tenaga perpustakaan
			2 Pengembangan Mitra Perpustakaan	3 peningkatan layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, layanan baca ditempat, layanan TIK, layanan anak, layanan puskeling, storytelling, dan pengembangan layanan disabilitas.
			3 Peningkatan Budaya Literasi mencakup :	
			- Pengembangan Budaya Gemar Membaca	
			- Peningkatan akses dan literasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial	
			- Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	4 pengembangan koleksi perpustakaan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Peningkatan Tenaga Perpustakaan	5 penelusuran dan akuisisi naskah kuno
			Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	6 peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno/ nusantara
			4 Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah kuno bagi terwujudnya pemajuan untuk memperteguh jati diri bangsa	7 Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, toko masyarakat, agama dan publik figur.
			5 peningkatan tata kelola dan manajemen perpustakaan	8 pembangunan database perpustakaan secara terpadu berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring perpustakaan di wilayah kabupaten pasuruan.
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	2 Meningkatkan hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1 meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Meningkatkan frekuensi pendampingan tata kelola kearsipan pada perangkat daerah dan desa/ kelurahan
			2 Meningkatkan regulasi daerah tentang kearsipan	2 meningkatkan kemampuan SDM kearsipan mengikuti perkembangan regulasi daerah tentang kearsipan
			3 peningkatan penyelamatan arsip/ dokumen daerah	3 meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait regulasi daerah tentang kearsipan
				4 meningkatkan pengawasan/ audit kearsipan internal terhadap pelaksanaan kearsipan
				5 meningkatkan akuisisi arsip daerah yang masih bernilai guna
				6 meningkatkan penelusuran arsip bernilai sejarah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1 Meningkatkan Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>	<p>1 Peningkatan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>2 Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>3 Peningkatan fungsi Pengawasan pelaksanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan harapan yang ingin dicapai dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang direncanakan, guna mencapai sasaran yang diinginkan.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	SUB KEGIATAN
1. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan</li><li>2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</li><li>4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</li><li>5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</li><li>6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pengembangan Bahan Pustaka</li> <li>9. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</li> <li>10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat</li> <li>2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</li> <li>4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</li> <li>5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah kabupaten/Kota</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,</li> </ul>



		<p>dan Pendaftaran Naskah Kuno</p> <p>2. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</p>
	<p>2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</p> <p>2. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</p>
<p>3. Program Pengelolaan Arsip</p>	<p>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</p> <p>2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</p> <p>3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI</p> <p>2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</p>
	<p>3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan</p>	<p>1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN</p>

		2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
	2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
	3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah



		<p>Kecamatan</p> <p>4. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan</p>
	<p>4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</p> <p>2. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</p>
	<p>5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang</p>	<p>1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang</p> <p>2. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang</p> <p>3. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)</p>
<p>5. Program Perizinan Penggunaan Arsip</p>	<p>1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</p> <p>2. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</p>
<p>4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Koordinasi dan</p>

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN</li> </ol>
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ol>
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>6. Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</li> </ol>
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pengadaan Mebel</li> <li>3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>



	<p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan Mebel</p> <p>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
--	---	---

## 6.2 Rencana Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026, maka rencana program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, target kerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan harapan yang ingin dicapai dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang direncanakan, guna mencapai sasaran yang diinginkan.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	SUB KEGIATAN
1. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



		<p>7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>8. Pengembangan Bahan Pustaka</p> <p>9. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</p> <p>10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat</p> <p>2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</p> <p>4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</p> <p>5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah kabupaten/Kota</p>
<p>3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</p>	<p>1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,</p>

		<p>dan Pendaftaran Naskah Kuno</p> <p>2. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</p>
	<p>2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</p> <p>2. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</p>
<p>3. Program Pengelolaan Arsip</p>	<p>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</p> <p>2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</p> <p>3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI</p> <p>2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</p>
	<p>3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan</p>	<p>1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN</p>



		2. PEMBERDAYAAN Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
	2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
	3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah

		<p>Kecamatan</p> <p>4. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan</p>
	<p>4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</p> <p>2. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</p>
	<p>5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang</p>	<p>1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang</p> <p>2. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang</p> <p>3. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)</p>
<p>5. Program Perizinan Penggunaan Arsip</p>	<p>1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</p> <p>2. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</p>
<p>4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Koordinasi dan</p>



		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN</li> </ol>
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ol>
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>6. Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</li> </ol>
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pengadaan Mebel</li> <li>3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>

	<p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pemeliharaan Mebel</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ol>
--	---	--

## 6.2 Rencana Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026, maka rencana program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, target kerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			I. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN													
Meningkatnya kegemaran Membaca Masyarakat				Indikator Tujuan : 1. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai Tingkat Kegemaran Masyarakat diperoleh dari hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	84.50	85	1,463,722,367	85.50	2,128,272,367	86	2,498,756,774	86	6,090,751,508		
	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial			Indikator Sasaran : 1. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	$= \frac{\sum ULPM}{AM} \times 100$	8.50%	8.60%	1,132,795,367	8.70%	1,656,345,367	8.80%	1,925,829,774	8.80%	4,713,970,508		
				Indikator Sasaran : Prosentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Jumlah Perpustakaan Desa yang sudah melaksanakan TPBIS dibagi Jumlah Perpustakaan Desa di Kab. Pasuruan x 100%	5.00%	5.00%	330,927,000	5.50%	472,927,000	5.70%	572,927,000	16.20%	1,376,781,000		
	Meningkatnya perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan		1. Program Pembinaan Perpustakaan	Out come : Persentase Perpustakaan Ber-NSP	(Jumlah Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi Perpustakaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang memiliki NPP) x 100%	2.29%	2.70%	842,775,980	3.09%	1,264,775,980	3.47%	1,566,260,387	60.00%	3,673,812,347		
	Meningkatnya Perpustakaan berbasis inklusi Sosial			Out come : Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	(Jumlah Perpustakaan Desa yang sudah berbasis inklusi sosial dibagi Jumlah Perpustakaan Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan)x 100%	5.00%	5.00%	330,927,000	5.50%	472,927,000	5.70%	572,927,000	16.20%	1,376,781,000		
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan BerNSP		1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	(Jumlah Perpustakaan yang sudah dibina dan di kembangkan dibagi Jumlah target perpustakaan yang ada di Kabupaten Pasuruan ) x 100%	100.00%	100.00%	125,000,000	100.00%	155,000,000	100.00%	275,000,000	300.00%	555,000,000		



Tujuan	Saasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tercukupinya Koleksi Perpustakaan			Output : Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	(Jumlah Koleksi baru perpustakaan dibagi Jumlah Koleksi sebelumnya) x 100%	100.00%	100.00%	249,251,480	100.00%	389,251,480	100.00%	389,260,000	300.00%	1,026,762,960		
	Meningkatnya Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan sesuai dengan standar			Output : Persentase Peningkatan Kapasitas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart	(Jumlah pustakawan/tenaga teknis perpustakaan yang memperoleh pendidikan/pelatihan sesuai standar dibagi jumlah target pustakawan/tenaga perpustakaan yang akan dibina) x 100%	100.00%	100.00%	63,099,000	100.00%	150,099,000	100.00%	150,099,000	300.00%	363,297,000		
	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan			Output : Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan pertahun dibagi Jumlah penduduk usia baca) x 100%	100.00%	100.00%	241,545,000	100.00%	266,545,000	100.00%	262,545,000	300.00%	790,636,000		
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) dan Jejaring Perpustakaan		1.1.1.Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Output : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	5 Layanan	80,000,000	5 Layanan	95,000,000	5 Layanan	121,000,000	15 Layanan	296,000,000		
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		1.1.2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	105,295,000	1 Perpustakaan	85,295,000	1 Perpustakaan	105,295,000	3 Perpustakaan	295,885,000		
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.1.3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		100 Eksemplar	75,000,000	100 Eksemplar	85,000,000	100 Eksemplar	85,000,000	300 Eksemplar	245,000,000		
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		1.1.4. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Output : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		40 Perpustakaan	100,000,000	40 Perpustakaan	105,000,000	40 Perpustakaan	200,000,000	120 Perpustakaan	405,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		1.1.5. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		10 Perpustakaan	25,000,000	10 Perpustakaan	50,000,000	10 Perpustakaan	75,000,000	30 Perpustakaan	150,000,000		
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.1.6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Orang	50,775,000	100 Orang	77,775,000	100 Orang	77,775,000	300 Orang	206,325,000		
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		1.1.7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	25 Layanan	25 Layanan	56,250,000	25 Layanan	86,250,000	25 Layanan	56,250,000	75 Layanan	198,750,000		
	Terlaksananya Pengembangan Bahan Perpustakaan Terceat Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		1.1.8. Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Bahan Perpustakaan Terceat yang Diotak dan Diadakan	Jumlah Bahan Perpustakaan Terceat yang Diotak dan Diadakan		100 Eksemplar	23,260,000	100 Eksemplar	53,260,000	100 Eksemplar	53,260,000	30 Eksemplar	129,780,000		
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		1.1.9. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	150,991,480	3000 Eksemplar	250,991,480	3000 Eksemplar	250,000,000	8000 Eksemplar	651,982,960		
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.1.10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen	12,324,000	12 Dokumen	72,324,000	12 Dokumen	72,324,000	36 Dokumen	156,972,000		
	Meningkatnya kegiatan pengembangan minat baca Masyarakat		1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca	(Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca yang sudah dilakukan dibagi Jumlah target Kegiatan minat Baca yang akan dilakukan setiap Tahun) x 100 %	100.00%	100.00%	80,868,800	100.00%	160,868,800	100.00%	297,334,387	300.00%	539,061,387		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Literasi Berbasis Inklusif Sosial			Output : Persentase Literasi Berbasis Inklusif Sosial	(Jumlah Perpustakaan desa yang sudah berbasis inklusif sosial dibagi Jumlah Perpustakaan desa) x 100%	5.00%	5.00%	330,927,000	5.50%	472,927,000	5.70%	572,927,000	16.20%	1,376,781,000		
				Output : Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	(Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dibagi Jumlah Populasi penduduk di Kabupaten Pasuruan) x 100%		0.23%	83,022,000	0.23%	143,022,000	0.23%	173,022,000	0.23%	399,066,000		
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi		1.2.1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	24 Lokus	24 Lokus	80,858,500	24 Lokus	160,858,500	24 Lokus	297,334,387	72 Lokus	539,051,387		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.2.2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perpustakaan	-	Perpustakaan	-	Perpustakaan	-	Perpustakaan	-		
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat sasaran		1.2.3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	6 Orang	45,022,000	6 Orang	55,022,000	6 Orang	85,022,000	18 Orang	185,066,000		
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota		1.2.4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Output : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	10 Perpustakaan	330,927,000	10 Perpustakaan	472,927,000	10 Perpustakaan	572,927,000	30 Perpustakaan	1,376,781,000		
	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.2.5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya	1 Orang	1 Orang	38,000,000	1 Orang	88,000,000	1 Orang	88,000,000	16.20%	214,000,000		
	Meningkatnya Koleksi Daerah yang di temukan dan dilestarikan		2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Output : Persentase Koleksi Daerah yang Dilestarikan	(Jumlah Koleksi Daerah yang sudah dilestarikan dibagi Jumlah Koleksi yang dimiliki Daerah) x 100%	20.00%	20.00%	290,019,387	20.00%	390,869,387	20.00%	389,869,387	60.00%	1,040,188,181		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokal
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		2.1. Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/Kota	Output : <i>Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>(Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang sudah dilestarikan dibagi Jumlah target Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilestarikan selama 3 tahun ) x 100%</i>	10.00%	10.00%	122,390,000	10.00%	191,940,000	10.00%	191,940,000	30.00%	506,270,000		
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		2.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Output : <i>Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno</i>	<i>Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno</i>		24 Orang	61,750,000	24 Orang	85,050,000	24 Orang	85,050,000	72 Orang	231,850,000		
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		2.1.2. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naska Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Di dayagunakan	Output : <i>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i>	<i>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i>	10 Eksemplar	10 Eksemplar	60,640,000	10 Eksemplar	106,890,000	10 Eksemplar	106,890,000	30 Eksemplar	274,420,000		
	Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang di temukan dan dilestarikan		2.2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Output : <i>Persentase Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan</i>	<i>(Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan dibagi Jumlah Target Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan selama 3 tahun ) X 100%</i>	10.00%	10.00%	167,629,387	10.00%	188,629,387	10.00%	187,629,387	30.00%	633,688,161		
	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2.2.1 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Output : <i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>	<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>	2 Eksemplar	2 Eksemplar	85,789,387	2 Eksemplar	85,789,387	2 Eksemplar	85,789,387	6 Eksemplar	257,368,161		
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2.2.2. Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Output : <i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>	<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>		2 Eksemplar	81,840,000	2 Eksemplar	112,840,000	2 Eksemplar	81,840,000	6 Eksemplar	276,520,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip				Tujuan : Nilai Audit Kearsipan	Aspek Kebijakan (20%) + Aspek Pembinaan (14%) + Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Rentang Sekurangnya 10 Tahun (17%) + Aspek Pengelolaan Arsip Statis (17%) + Aspek Sumber Daya Kearsipan (33%) (PENILAIAN ANRI)	67,95	68			68,5			69				
Meningkatnya hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah				Indikator Sasaran : Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara Baku	(Jumlah perangkat daerah sudah melakukan pengelolaan kearsipan secara Baku dibagi Jumlah target perangkat daerah) x 100%	10.00%	14.70%	1,170,248,000	22.06%	1,343,248,000	29.41%	1,364,248,000	29.41%	3,623,744,000			
Meningkatnya pengelolaan, perawatan dan pelestarian arsip			3. Program Pengelolaan Arsip	Out come : Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	(Jumlah Arsip yang sudah dikelola, dirawat dan dilestarikan dibagi Jumlah arsip yang ada) x 100%	30.00%	30.00%	553,129,000	36.00%	766,129,000	40.00%	807,129,000	106.00%	2,128,387,000			
Meningkatnya pengelolaan Arsip Dinamis			3.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat	(Jumlah Arsip dinamis yang telah dikelola dibagi Jumlah arsip yang terdapat pada daftar arsip) x 100%	65.00%	65.00%	190,050,000	70.00%	283,050,000	75.00%	303,050,000	215.00%	776,150,000			
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			3.1.1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Output : Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan		25000 Berkas	15,000,000	25000 Berkas	85,000,000	25000 Berkas	95,000,000	75000 Berkas	195,000,000			
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			3.1.2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Output : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan Penyusutan	28965 Berakas	28965 Berakas	75,775,000	28965 Berakas	105,775,000	28965 Berakas	105,775,000	86895 Berakas	287,325,000			
Meningkatnya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			3.1.3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	66 Laporan	89,275,000	66 Laporan	102,275,000	66 Laporan	102,275,000	198 Laporan	293,825,000			
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis			3.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase Arsip Statis yang Telah dibuatkan sarana bantu temu balik	(Jumlah Arsip Statis yang Telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi Jumlah seluruh Arsip statis yang terdapat pada daftar arsip) x 100%	5.00%	5.00%	94,530,000	6.00%	194,530,000	7.00%	195,530,000	18.00%	484,590,000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyempalan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		3.2.1. Pengumpulan dan Penyempalan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Output : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		10 Arsip	28,265,000	10 Arsip	78,265,000	10 Arsip	78,265,000	30 Arsip	184,795,000		
	Terlaksananya Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		3.2.2. Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Output : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	30 Arsip	30 Arsip	66,265,000	30 Arsip	116,265,000	30 Arsip	117,265,000	150 Arsip	299,795,000		
	Meningkatnya data arsip simpul Jaringan yang masuk dalam jaringan SIKN melalui JIKN		3.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Persentase Jumlah arsip yang dimasukkan dalam Jaringan SIKN melalui JIKN	(Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis ) x 100%	3.00%	3.00%	278,549,000	3.30%	278,549,000	3.60%	308,549,000	9.90%	885,847,000		
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		3.3.1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Output : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	30 Pengguna	50,000,000	30 Pengguna	50,000,000	30 Pengguna	80,000,000	180 Pengguna	180,000,000		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		3.3.2. Peningkatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Output : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	12 Laporan	228,549,000	12 Laporan	228,549,000	12 Laporan	228,549,000	36 Laporan	885,847,000		
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Output : Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	(Jumlah Arsip yang dapat di selamatkan dan dilindungi dibagi Jumlah Targt Arsip yang dapat di selamatkan dan dilindungi selama 3 Tahun) x 100%	5.00%	5.00%	557,119,000	5.50%	517,119,000	5.50%	487,119,000	16.00%	1,317,357,000		
	Meningkatnya kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK		4.1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Output : Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK	(Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan dibagi jumlah target arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan sesuai dengan NSPK selama kurun waktu 3 Tahun )x 100%	3.00%	3.00%	60,549,000	3.00%	60,549,000	3.00%	60,549,000	9.00%	181,647,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		4.1.1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	30 Arsip	105,000,000		
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun		4.1.2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Output : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		120 Berkas	25,549,000	120 Berkas	25,549,000	120 Berkas	25,549,000	360 Berkas	76,647,000		
	Meningkatnya Penyelamatan Arsip Akibat Bencana dengan NSPK		4.2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Output : Persentase Arsip yang Dievakuasi, Diidentifikasi, dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana	(Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan dibagi Jumlah target arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan selama 3 tahun) x 100%	1.00%	1.00%	50,000,000	1.20%	50,000,000	1.30%	50,000,000	3.50%	50,000,000		
	Terlaksananya Evakuasi, identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		4.2.1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	30 Arsip	75,000,000		
	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		4.2.2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	30 Arsip	75,000,000		



Tujuan	Saasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/ Diburakan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		4.3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/ Diburakan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Output : Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ diburakan dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan NSPK	(Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan , penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi PD Kab dibagi Jumlah target Daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan, dan penilaian serta penyerahan/ pemusnahan arsip bagi penggabungan dan pembubaran PD Kab/Kota sesuai dengan NSPK selama 3 tahun ) x 100%	1.00%	1.00%	216,570,000	1.00%	166,570,000	1.00%	116,570,000	300.00%	489,710,000		
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		4.3.1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		10 Arsip	55,750,000	10 Arsip	25,750,000	10 Arsip	25,750,000	150 Arsip	107,250,000		
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		4.3.2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		10 Arsip	58,980,000	10 Arsip	28,980,000	10 Arsip	28,980,000	10 Arsip	116,940,000		
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		4.3.3. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Output : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		10 Arsip	50,920,000	10 Arsip	50,920,000	10 Arsip	30,920,000	30 Arsip	132,760,000		
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		4.3.4. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Output : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		24 Arsip	50,920,000	24 Arsip	50,920,000	24 Arsip	30,920,000	36 Arsip	132,760,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK		4.4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Output : Persentase Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	(Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip dibagi jumlah target daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip selama 3 tahun) x 100%	2.00%	2.00%	72,000,000	2.00%	72,000,000	2.00%	72,000,000	6.00%	72,000,000		
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		4.4.1. Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Output : Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		10 Arsip	47,000,000	10 Arsip	47,000,000	10 Arsip	47,000,000	30 Arsip	141,000,000		
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		4.4.2. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Output : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	10 Arsip	25,000,000	30 Arsip	75,000,000		
	Meningkatnya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		4.5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Output : Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	(Jumlah Daftar Pencarian Arsip yang dilakukan penetapan dan pengumuman dibagi jumlah target Daftar Pencarian Arsip yang dilakukan penetapan dan pengumuman selama 3 Tahun) x 100%	3.00%	3.00%	188,000,000	3.00%	178,000,000	3.00%	188,000,000	9.00%	524,000,000		
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		4.5.1. Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Output : Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan		10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	30 Arsip	105,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		4.5.2. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Output : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		10 Arsip	38,000,000	10 Arsip	58,000,000	10 Arsip	58,000,000	30 Arsip	154,000,000		
	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		4.5.3. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Output : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	10 Arsip	10 Arsip	85,000,000	10 Arsip	85,000,000	10 Arsip	95,000,000	30 Arsip	265,000,000		
	Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip		6. Program Perizinan Penggunaan Arsip	Out come : Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	(Jumlah Perizinan penggunaan Arsip yang telah dibuat dibagi Jumlah Target pembuatan Perizinan Penggunaan Arsip selama 3 Tahun) x 100%	2.00%	2.00%	60,000,000	2.00%	60,000,000	2.00%	60,000,000	6.00%	180,000,000		
	Meningkatnya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		5.1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Output : Persentase Layanan Penggunaan Perizinan Arsip yang bersifat tertutup	(Jumlah Layanan Penggunaan Perizinan Arsip yang telah dilakukan dibagi Jumlah Target Layanan Penggunaan Perizinan Arsip yang bersifat tertutup selama 3 Tahun) x 100%		2.00%	60,000,000	2.00%	60,000,000	2.00%	60,000,000	6.00%	180,000,000		
	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		5.1.1. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Output : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		2 SOP	25,000,000	2 SOP	25,000,000	2 SOP	25,000,000	6 SOP	75,000,000		
	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		5.1.2. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Output : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	10 Arsip	35,000,000	30 Arsip	105,000,000		
			<b>IV. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>													
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perencanaan (30%) + Pengukuran (28%) + Pelaporan (18%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)	80	80	7,145,393,027	81	7,774,747,637	82	9,080,203,316	82	24,000,343,879		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awa Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungw wab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik		6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Out come : persentase dokumen / laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi	(Jumlah laporan atau dokumen administrasi PD yang akurat atau sesuai regulasi / Jumlah laporan atau dokumen yang harus dipenuhi ) x 100%	100.00%	100.00%	7,145,393,027	100.00%	7,774,747,537	100.00%	9,080,203,315	300.00%	24,000,343,879		
	Tersusunnya konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/subkegiatan pada rencana, Anggaran, dan evaluasi		6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jumlah Indikator kinerja prog/keg/sub keg. yang konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi Jumlah Indikator kinerja prog/keg/sub keg	100.00%	100.00%	133,478,000	100.00%	143,478,000	100.00%	166,478,000	300.00%	443,434,000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doc	6 Doc	45,777,000	6 Doc	55,777,000	6 Doc	65,777,000	18 Doc	167,331,000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	12 Lap	87,701,000	12 Lap	87,701,000	12 Lap	100,701,000	36 Lap	276,103,000		
	Tersedianya Laporan Keuangan yang akurat		6.2. Administrasi Keuangan	Output : Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	(Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dibagi Jumlah Laporan Keuangan harus dipenuhi)x 100%	100.00%	100.00%	4,856,299,707	100.00%	4,856,109,995	100.00%	6,306,109,995	300.00%	16,118,519,697		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		6.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orgg /Bln	25 Orgg /Bln	3,856,299,707	25 Orgg /Bln	3,906,109,995	25 Orgg /Bln	5,106,109,995	25 Orgg /Bln	12,868,519,697		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	1,000,000,000	12 Dok	1,050,000,000	12 Dok	1,200,000,000	36 Dok	3,250,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya kebutuhan umum Perangkat Daerah		6.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	(Jumlah Kebutuhan umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Rencana kebutuhan yang harus dipenuhi)x100%	100.00%	100.00%	659,115,320	100.00%	709,115,320	100.00%	858,115,320	300.00%	2,226,345,960		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35,000,000	4 Paket	35,000,000	4 Paket	45,000,000	12 Paket	115,000,000		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	87,115,320	7 Paket	87,115,320	7 Paket	105,115,320	21 Paket	279,345,960		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		6.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	98,000,000	4 Paket	148,000,000	4 Paket	102,000,000	12 Paket	348,000,000		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		6.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	41,000,000	3 Paket	41,000,000	3 Paket	81,000,000	9 Paket	163,000,000		
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	78,000,000	8 Dokumen	78,000,000	8 Dokumen	95,000,000	24 Dokumen	251,000,000		
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		6.3.6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	45,000,000	36 Laporan	115,000,000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	285,000,000	24 Laporan	285,000,000	24 Laporan	385,000,000	72 Laporan	955,000,000		
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)		6.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output : Persentase Pengadaan barang milik daerah (BMD) yang terealisasi	(Jumlah unit yang direalisasi dibagi Jumlah unit yang direncanakan) x 100%	100.00%	100.00%	192,000,000	100.00%	592,000,000	100.00%	295,000,000	300.00%	1,079,000,000		
	Tersedianya Mebel		6.4.2. Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	27,000,000	20 Unit	227,000,000	7 Unit	40,000,000	30 Unit	294,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Perhitungan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		6.4.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit	165,000,000	25 Unit	365,000,000	10 Unit	255,000,000	40 Unit	785,000,000					
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia	(Jumlah Jasa penunjang operasional kantor yang tersedia dibagi Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang ditargetkan) x 100%	100.00%	100.00%	441,500,000	100.00%	541,500,000	100.00%	541,500,000	300.00%	1,624,500,000					
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	441,500,000	12 Laporan	541,500,000	12 Laporan	541,500,000	36 Laporan	1,624,500,000					
	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan Baik		6.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Persentase BMD kondisi Baik	(Jumlah BMD kondisi baik dibagi Jumlah BMD Yang terregister) x 100%	100.00%	100.00%	863,000,000	100.00%	832,544,222	100.00%	913,000,000	300.00%	2,608,544,222					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	373,000,000	24 Unit	383,000,000	24 Unit	473,000,000	72 Unit	1,229,000,000					
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		6.6.2. Pemeliharaan Mebel	Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	15 Unit	25,000,000	25 Unit	35,000,000	15 Unit	25,000,000	15 Unit	85,000,000					
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	65,000,000	35 Unit	114,544,222	20 Unit	65,000,000	105 Unit	244,544,222					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	6 Unit	750,000,000					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	150,000,000	1 Unit	50,000,000	7 Unit	100,000,000	21 Unit	300,000,000					
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>														<b>9,779,363,394</b>	<b>11,246,267,904</b>	<b>12,933,208,089</b>	<b>33,714,839,387</b>		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah :

#### 1. Urusan Perpustakaan

Tujuan	:	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
Indikator Tujuan	:	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
Sasaran	:	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2. Prosentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

#### 2. Urusan Kearsipan

Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip
Indikator Tujuan	:	Nilai Audit Kearsipan
Sasaran	:	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	:	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku

#### 3. Sekretariat

Sasaran	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator Sasaran	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 - 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Indikator Kinerja OPD
2. Indikator Kinerja Program

Perumusan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun ke-0 (2024) merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun ke-1 (2025) sampai dengan tahun ke-2 (2026) merupakan target kinerja yang direncanakan. Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1, sedangkan indikator kinerja program disajikan pada tabel 7.2

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Sasaran Perangkat Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPKD KP 2024 - 2026
					Transisi	I	II	
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Persen	8,00%	8,60%	8,70%	8,80%	8,80%
		Prosentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	5,00%	5,00%	5.50%	5.70%	5.70%
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah secara baku	Persen	10.00%	14.70%	22.05%	29.41%	29.41%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	80	81	82	82



**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Mengacu  
Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Program Prioritas Disperpusip	Indikator Kinerja Progran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RKPD KP 2024 - 2026
					Transisi	I	II	
					2023	2024	2025	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Ber NSP	%	2,29%	2,70%	3,09%	3,47%	3,47%
		Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	%	3,90%	5%	5,5%	5,7%	5,7%
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Daerah Yang Dilestariakan	%	20%	20%	20%	20%	60%
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	%	30%	30%	35%	2.8%	2.8%
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	%	5%	5%	5%	5%	5%
5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	2%	2%	2%	2%	2%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase dokumen / laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi	%	100%	100%	100%	100%	100%

**7.2 Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026 Melalui Indikator Kunci (IKK).**

Sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Keasripan kabupaten Pasuruan mencerminkan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang hendak dicapai, yang meliputi 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Perpustakaan berstandar Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Literasi berbasis inklusi Sosial;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja.

Masing-masing sasaran diturunkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing unit kerja yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Seluruh sasaran ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam 2 (dua) indikator kunci (IKK) antara lain:

## B. Bidang Perpustakaan

No	IKK Outcome	Rumus	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RKPD 2024 - 2026
			2023	Transisi	I	II	
				2024	2025	2026	
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	84,50	85,00	85,50	85,60	85,60
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\Sigma \frac{UPLM}{ALM} \times 100$	8,00%	8,60%	8,70%	8,80%	8,80%

## C. Bidang Kearsipan

No	IKK Outcome	Rumus	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RKPD 2024 - 2026
			2023	Transisi	I	II	
				2024	2025	2026	
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$	100	100	100	100	100
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	100	100	100	100	100



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renstra sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Pasuruan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang–bidang di

lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Pasuruan, 2023  
KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

Drs. HENIS WIDIYANTO MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660403 199103 1 018



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**